

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TOP 09.03.1.46.56230

BERLAKU SID TANGGAL
4 JUN 2013

PENDAFTARAN: BARU

PEMBAHARUAN:

NAMA PERUSAHAAN

BUMI SAWIT LESTARI, PT

STATUS:

KANTOR TUNGGAL

PENANGGUNG JAWAB I PENGURUS GEORGE OFTOMO

ALAMAT :

GD. THE EAST LT. 23 JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN

KAV. E,3,2 NO. 1 KUNINGAN TIMUR, SETIABUDI, JAKARTA SELATAN

DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR

NPWP: 02.751.982.6.063.000

NOMOR TELEPON

FAX:

KEGIATAN USAHA POKOK

NOA DAFTAR PEI

PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN

4620.

HEWAN HIDUP

JAKARTA, 22 MARET 2011
KEPALA SUKU DINAS KOPERASI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
SELAKUKÉPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

DRSMDODDY S. GESO, MM

DA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

USAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

KETERANGAN

- Lembar 1

: Yang bersangkutan

DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERU DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERU DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERU

DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PERUSAHAAN. TANDA DAFTAR PER

Perhatian

- 1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- 2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha
- Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- 4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasan, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- 5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau

VENELAR DESCRIPTION DE L'ARTEST DE LA COMPANIE DE L

TOO I COSTON SOCOSSON THE

H THE PART HAVE IN

- d. Perusahaan berhenti akibat Akta pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
- e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

COD BEING TO SERVED TO THE PARTY

6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

- Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggitingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP
- 3. Barang siapa yang tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaanya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.